



PEM PROV

Pelajari Hasil Temuan BPK

GUBERNUR Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji menyatakan akan mempelajari rekomendasi BPK RI terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Salah satunya mengenai masih adanya laporan pertanggungjawaban belanja hibah barang senilai Rp374,07 miliar yang tidak lengkap.



◆ Ke Halaman 7 kolom 5

Pelajari Hasil Temuan BPK

Sambungan dari halaman 1

Ia mengaku belum mengetahui pasti masalah ini dan akan membicarakannya lebih lanjut dengan pihak terkait. Namun mengenai hibah dan bantuan sosial (bansos) ini, ke depan ia memastikan bahwa semua akan dilakukan secara terbuka.

Pemerintah akan memasang pengumuman di media massa terkait siapa saja yang mendapat bantuan dan berapa besar bantuan tersebut secara detail. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahuinya dan tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi.

"Lembaga mana dan apa saja yang dapat, berapa jumlahnya, sudah SPJ atau belum. Semua diumumkan ke media. Kalau isinya empat halaman ya empat halamanlah," ungkapnya kepada Pontianak Post, Kamis (20/9).

Kebijakan tersebut menu-

rutnya sudah akan dimulai tahun ini. Pada akhir 2018, seluruh bantuan baik berupa hibah atau bansos akan diumumkan. "Nah apalagi yang mau ditutupi. Dan mengapa, kan proyeknya sudah lewat, lelang ULP (*Unit Layanan Pengadaan*), terbuka juga. Jadi sudah harus seperti itu (diumumkan)," pungkasnya.

Seperti diberitakan, pada awal Juni 2018, Pemprov Kalbar kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD tahun anggaran 2017. Namun BPK RI pernah memberikan beberapa catatan atau rekomendasi.

Salah satunya tentang pertanggungjawaban belanja hibah barang kepada pihak ketiga yang tidak lengkap. Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz saat dikonfirmasi Pontianak Post masih enggan menjawab terperinci mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut.

Harry Azhar, awal Juni lalu mengingatkan bahwa rekomendasi BPK RI hendaknya ditindaklanjuti pemprov dengan tenggat waktu selama 60 hari. Sementara itu, Ireng Maulana, Pengamat Sosial Politik Untan mengatakan masyarakat pasti bertanya-tanya bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI terhadap LHP Pemprov Kalbar tahun anggaran 2017 silam.

"Sekarang sudah bulan September. Berarti waktunya sudah habis. Harusnya Pemprov atau BPK RI sudah mengumumkan bagaimana tindak lanjut temuan BPK RI tersebut," ucapnya.

Dia percaya Pemprov bersama DPRD Kalbar sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. "Pasti sudah adalah. Tinggal diumumkan ke publik melalui media saja. Saya percaya sudah dijalankan rekomendasi tersebut," katanya. (*bar/den*)